

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL TAHUN 2023
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2023 adalah dokumen perubahan perencanaan kinerja dan penganggaran Perangkat Daerah untuk tahun 2023, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Recana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Sosial, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2018-2023.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Rencana Kerja tahun 2023 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang sosial. Melalui Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Pangkajene Sidenreng, Maret 2022
Kepala Dinas Sosial,

SOALIHIN, S. Pd., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660717 199103 1 018

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR.. | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 3 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 5 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... | 5 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 11 |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 12 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 12 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 19 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL | 20 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... | 20 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... | 20 |
| 3.3. Program dan Kegiatan..... | 26 |
| BAB IV PENUTUP | 28 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD | 7 |
| Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial..... | 11 |
| Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | 13 |
| Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2022 | 21 |
| Tabel Program dan Kegiatan..... | 26 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan dokumen yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Sosial menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan dalam sektor yang mengacu pada RPJMD 2018- 2023. Rencana Kerja SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2007;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan dan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 – 2025;

13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (RPJMD) 2014 – 2020;
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016;
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk dapat menyelesaikan permasalahan/hambatan dan tantangan utama serta menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dalam kurun waktu 1 tahun. Penyusunan Renja ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan yang diusulkan serta merupakan jabaran dari Renstra agar penyelenggaraan dan pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan sinkron dengan arah pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
2. Memantapkan kinerja Dinas Sosial agar lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai visi misi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah untuk mendiskripsikan tentang program program prioritas pembangunan nasional dan daerah yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Rencana Kerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 1.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengukur suatu aktivitas tertentu baik yang terkait perencanaan, pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan aktivitas. Pada konteks organisasi evaluasi adalah langkah penting dan strategis terutama guna mengukur tingkat pencapaian kinerja kelembagaan baik internal maupun eksternal, dimana hasil rumusan evaluasi pada kelanjutannya dapat menjadi pedoman bagi penentuan kebijakan, strategi dan program organisasi tersebut dimasa yang akan datang. Seiring dengan berkembangnya era reformasi, tuntutan akan reformasi birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menjadi amanat yang harus dijalankan terutama oleh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, dimana objektivitas pengukuran atas akuntabilitas tersebut dapat ditempuh melalui evaluasi sebagai instrumennya.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas Sosial juga perlu untuk mengembangkan mekanisme evaluasi sebagai muatan objektif peningkatan kinerja kelembagaan sebagaimana yang diharapkan bersama, dimana hasilnya akan menentukan pengembangan kebijakan, strategi dan program pembangunan pada urusan sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 yang terkait program, kegiatan dan anggaran sampai dengan Triwulan I berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang perlu untuk disikapi sebagai suatu catatan evaluasi atas perencanaan tahunan sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan kinerja di tahun 2022 yang lalu. Catatan-catatan kinerja berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2022 masih terus berupaya melakukan pembenahan internal terkait berbagai aspek baik sumber daya manusia, system dan prosedur termasuk data dan sarana prasarana penunjang kinerja kelembagaan, termasuk dalam penyusunan berbagai standardisasi pelayanan kinerja kelembagaan. Konteks tersebut pada masa mendatang diharapkan dapat terbenahi dengan baik seiring dengan penerapan ketentuan standard pelayan minimal yang harus dikembangkan disetiap OPD termasuk Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pelaksanaan pengembangan bidang Sosial yang dilakukan baik secara langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang maupun yang dilaksanakan secara teknis oleh Pihak Ketiga, dimasa mendatang sangat membutuhkan tingkat

sosialisasi yang terencana kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat menumbuh kembangkan tingkat kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya atas rasa saling memiliki terhadap pembangunan yang dilaksanakan sehingga dapat mendukung terciptanya pola hubungan harmonis dan sinergis antara pelaksana kegiatan dan masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya akan memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hasil kegiatan dan efektifitas serta efesiensi.

Berikut Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2022:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2022
Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Sosial

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) | | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|------|---|--|--|--|---|---|-----------------------|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | NON URUSAN | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 50 | 50% | 100 | 100% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun | 18 | 6 | 6 | 3 | 50% | 6 | 33% |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 15 | 15% | 100 | 100% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 36 | 12 | 12 | 3 | 25% | 12 | 33% |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Administrasi Keuangan | 36 | 12 | 12 | 3 | 25% | 12 | 33% |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 15 | 15% | 100 | 100% |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 36 | 12 | 12 | 3 | 25% | 12 | 33% |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Luar Maupun dalam Daerah yang Dilaksanakan | 630 | 250 | 210 | 13 | 6% | 210 | 33% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 100 | 2 | 2% | 100 | 100% |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang Diadakan | 150 | 100 | 50 | 0 | 0% | 50 | 33% |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin yang Diadakan | 150 | 100 | 50 | 2 | 4% | 50 | 33% |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 100 | 15 | 15% | 100 | 100% |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4500 | 1500 | 1500 | 50 | 3% | 1500 | 33% |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 36 | 12 | 12 | 3 | 25% | 12 | 33% |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 100 | 0 | 0% | 100 | 100% |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara | 39 | 24 | 13 | 0 | 0% | 13 | 33% |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara | 26 | 50 | 0 | 0 | 0% | 13 | 50% |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 50% |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Cakupan Lembaga Kesejahteraan Yang Dibina | 100 | 100 | 100 | 0 | 0% | 100 | 100% |
| | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase PSKS Yang Tertangani | 100 | 100 | 100 | 0 | 0% | 100 | 100% |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga yang Dibina | 18 | 5 | 6 | 0 | 0% | 6 | 33% |
| | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Dibina | 100 | 100 | 100 | 98 | 98% | 100 | 100% |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi | 100 | 100 | 100 | 4 | 4% | 100 | 100% |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti | 45 | 7 | 15 | 4 | 27% | 15 | 33% |
| | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat | Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti | 1770 | 10 | 590 | 0 | 0% | 590 | 33% |
| | | Jumlah Anak Telantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti | 93 | 10 | 31 | 0 | 0% | 31 | 33% |
| | | Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti | 4647 | 10 | 1549 | 0 | 0% | 1549 | 33% |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Cakupan Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin | 100 | 100 | 100 | 99 | 99% | 100 | 100% |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial | 100 | 100 | 100 | 99 | 99% | 100 | 100% |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Masyarakat Miskin yang Dikelola | 31611 | 12951 | 5709 | 144673 | 100% | 12951 | 41% |
| | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | 100 | 100 | 100 | 96 | 96% | 100 | 100% |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial | 100 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100 | 100% |
| | Penyediaan Makanan | Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang Mendapatkan Paket Makanan | 80 | 0 | 0 | 0 | 0% | 80 | 100% |
| | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap | 100 | 100 | 100 | 99 | 99% | 100 | 100% |
| | Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah TAGANA yang Diberdayakan | 111 | 25 | 80 | 37 | 46% | 37 | 33% |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| | PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani | 100 | 100 | 100 | 0 | 0% | 100 | 100% |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan | 100 | 100 | 100 | 0 | 0% | 100 | 100% |
| | Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Taman Makam Pahlawan, Monumen dll Yang Telah Direhabilitasi | 9 | 14 | 3 | 0 | 0% | 3 | 33% |
| | | | | | | | | | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang dapat dijadikan pedoman bagi penentuan kebijakan, strategi dan program dinas di masa yang akan datang.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Sidenreng Rappang

| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|--|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti | | 100% | 100% | 100% | 100% | 73.33% | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti | | 100% | 100% | 100% | 100% | 90,2% | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 5 | Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu-isu penting penyelenggaraan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang, diantaranya:

1. Belum maksimalnya data real bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum mendapat perhatian dari pemerintah.
3. Penyandang masalah kesejahteraan sosial kurang memiliki keterampilan.
4. Kesenjangan Kesejahteraan Sosial yang cukup tinggi antara masyarakat mampu dan tidak mampu.
5. Sarana dan prasarana lingkungan yang sangat minim.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Adapun review terhadap perbandingan antara RKPD 2023 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Sosial

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|------------------------|---|-------------------|----------------------|---|------------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | NON URUSAN | | | | | NON URUSAN | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA | Kab. Sidenreng Rappang | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 3,513,522,993 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA | Kab. Sidenreng Rappang | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 3,559,000,000 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 49,568,083 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 50,000,000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun | 6 Laporan | 49,568,083 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun | 6 Laporan | 50,000,000 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | 2,255,835,000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | 2,280,000,000 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Sidenreng Rappang | Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 2,222,000,000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Sidenreng Rappang | Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 2,250,000,000 | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Sidenreng Rappang | Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 5,050,000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Sidenreng Rappang | Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 6,000,000 | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kab. Sidenreng Rappang | Waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Bulan | 16,160,000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kab. Sidenreng Rappang | Waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Bulan | 15,000,000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun | 1 Laporan | 2,525,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun | 1 Laporan | 3,000,000 | |
| | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Dokumen Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 1 Dokumen | 5,050,000 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Dokumen Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 1 Dokumen | 3,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|-------------------|--------------------|---|-------------------------------|--|-------------------|--------------------|--|
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang Disusun | 12 Laporan | 5,050,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang Disusun | 12 Laporan | 3,000,000 | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah | 100 Persen | 17,170,000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah | 100 Persen | 22,000,000 | |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disusun | 1 Laporan | 3,535,000 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disusun | 1 Laporan | 3,500,000 | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 1 Laporan | 3,535,000 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 1 Laporan | 3,500,000 | |
| | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 13 Unit | 10,100,000 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 13 Unit | 15,000,000 | |
| | Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah | 100 Persen | 9,700,910 | Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah | 100 Persen | 11,000,000 | |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawian | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawian | 2 Dokumen | 5,307,410 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawian | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawian | 2 Dokumen | 6,000,000 | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Laporan | 4,393,500 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Laporan | 5,000,000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | 373,350,000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | 366,000,000 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Sidenreng Rappang | Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | 15,150,000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Sidenreng Rappang | Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | 16,000,000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia | 0 Unit | 35,000,000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia | 0 Unit | 30,000,000 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Sidenreng Rappang | Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 Bulan | 12,120,000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Sidenreng Rappang | Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 Bulan | 5,000,000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Luar Maupun dalam Daerah yang Dilaksanakan | 210 Kali | 311,080,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Luar Maupun dalam Daerah yang Dilaksanakan | 210 Kali | 315,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|-------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|-------------------|--------------------|--|
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 207,555,000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 220,000,000 | |
| | Pengadaan Mebel | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Mebel yang Diadakan | 50 Unit | 71,205,000 | Pengadaan Mebel | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Mebel yang Diadakan | 50 Unit | 80,000,000 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Peralatan dan Mesin yang Diadakan | 50 Unit | 136,350,000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Peralatan dan Mesin yang Diadakan | 50 Unit | 140,000,000 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 210,080,000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 210,000,000 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1500 Lembar | 2,020,000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1500 Lembar | 3,000,000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Sidenreng Rappang | Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 36,360,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Sidenreng Rappang | Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 35,000,000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Sidenreng Rappang | Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan | 171,700,000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Sidenreng Rappang | Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan | 172,000,000 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 390,264,000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 400,000,000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara | 13 Unit | 153,924,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara | 13 Unit | 155,000,000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara | 13 Unit | 13,130,000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara | 13 Unit | 15,000,000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara | 1 Unit | 202,000,000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara | 1 Unit | 205,000,000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | 21,210,000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | 25,000,000 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|-------------------|----------------------|--|------------------------|--|-------------------|--------------------|--|
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Kab. Sidenreng Rappang | Cakupan Lembaga Kesejahteraan Yang Dibina | 100 Persen | 1,003,183,510 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Kab. Sidenreng Rappang | Cakupan Lembaga Kesejahteraan Yang Dibina | 100 Persen | 935,500,000 | |
| | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase PSKS Yang Tertangani | 100 Persen | 1,003,183,510 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase PSKS Yang Tertangani | 100 Persen | 935,500,000 | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah TKSK yang Berpotensi Mendapatkan Penguatan Berinovasi dan Terus Beradaptasi | 11 Orang | 30,300,000 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah TKSK yang Berpotensi Mendapatkan Penguatan Berinovasi dan Terus Beradaptasi | 11 Orang | 35,000,000 | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Keluarga Yang Menerima Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu | 10614 KK | 94,183,510 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Keluarga Yang Menerima Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu | 10614 KK | 100,500,000 | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Lembaga yang Dibina | 6 Lembaga | 878,700,000 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Lembaga yang Dibina | 6 Lembaga | 800,000,000 | |
| | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Warga Negara Migran Yang Tertangani | 100 Persen | 1,515,000 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Warga Negara Migran Yang Tertangani | 100 Persen | 2,000,000 | |
| | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Warga Negara Migran yang Dipulangkan | 100 Persen | 1,515,000 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Warga Negara Migran yang Dipulangkan | 100 Persen | 2,000,000 | |
| | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Warga Negara Migran yang Difasilitasi untuk Dipulangkan | 1 Orang | 1,515,000 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Warga Negara Migran yang Difasilitasi untuk Dipulangkan | 1 Orang | 2,000,000 | |
| | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Dibina | 100 Persen | 383,640,000 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Dibina | 100 Persen | 420,800,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|--|
| | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi | 100 Persen | 383,640,000 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi | 100 Persen | 420,800,000 | |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti | 15 Orang | 140,640,000 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti | 15 Orang | 145,500,000 | |
| | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti | 590 Orang | 81,000,000 | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti | 590 Orang | 80,000,000 | |
| Kab. Sidenreng Rappang | | Jumlah Anak Telantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti | 31 Orang | 81,000,000 | Kab. Sidenreng Rappang | | Jumlah Anak Telantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti | 31 Orang | 80,000,000 | | |
| Kab. Sidenreng Rappang | | Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti | 1549 Orang | 81,000,000 | Kab. Sidenreng Rappang | | Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti | 1549 Orang | 80,000,000 | | |
| | Pemberian Layanan Kedaruratan | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Warga Negara yang Diberi Layanan Kedaruratan | 0 Orang | 0 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Warga Negara yang Diberi Layanan Kedaruratan | 0 Orang | 35,300,000 | |
| | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial yang Direhabilitasi | 100 Persen | 0 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial yang Direhabilitasi | 100 Persen | 0 | |
| | Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Lembaga Yang Bekerja Sama Memberi Edukasi Tentang Bahaya Dampak Narkoba | 0 Lembaga | 0 | Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Lembaga Yang Bekerja Sama Memberi Edukasi Tentang Bahaya Dampak Narkoba | 0 Lembaga | 0 | |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Kab. Sidenreng Rappang | Cakupan Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin | 100 Persen | 156,401,070 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Kab. Sidenreng Rappang | Cakupan Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin | 100 Persen | 170,500,000 | |
| | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Anak Terlantar yang Tertangani | 100 Persen | 7,070,000 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Anak Terlantar yang Tertangani | 100 Persen | 10,000,000 | |
| | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Anak Terlantar yang Tertangani | 10 Orang | 7,070,000 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Anak Terlantar yang Tertangani | 10 Orang | 10,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|-------------------|----------------------|--|------------------------|--|-------------------|----------------------|--|
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial | 100 Persen | 149,331,070 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial | 100 Persen | 160,500,000 | |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Data Masyarakat Miskin yang Dikelola | 12951 KK | 140,000,000 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Data Masyarakat Miskin yang Dikelola | 12951 KK | 150,500,000 | |
| | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Keluarga yang Mendapat Fasilitas Bantuan Sosial | 12951 KK | 9,331,070 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Keluarga yang Mendapat Fasilitas Bantuan Sosial | 12951 KK | 10,000,000 | |
| | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | 100 Persen | 200,000,000 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | 100 Persen | 250,000,000 | |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial | 100 Persen | 30,000,000 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial | 100 Persen | 50,000,000 | |
| | Penyediaan Makanan | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang Mendapatkan Paket Makanan | 0 KK | 30,000,000 | Penyediaan Makanan | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang Mendapatkan Paket Makanan | 80 KK | 50,000,000 | |
| | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap | 100 Persen | 170,000,000 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap | 100 Persen | 200,000,000 | |
| | Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | 37 Orang | 170,000,000 | Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | 37 Orang | 200,000,000 | |
| | PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani | 100 Persen | 80,295,000 | PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani | 100 Persen | 100,000,000 | |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan | 100 Persen | 80,295,000 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan | 100 Persen | 100,000,000 | |
| | Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Taman Makam Pahlawan, Monumen dll Yang Telah Direhabilitasi | 3 Unit | 80,295,000 | Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Kab. Sidenreng Rappang | Jumlah Taman Makam Pahlawan, Monumen dll Yang Telah Direhabilitasi | 3 Unit | 100,000,000 | |
| | | | | | 5,338,557,573 | | | | | 5,437,800,000 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui musyawarah pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dihadiri oleh berbagai kelompok masyarakat, kepala desa, ormas dan lain sebagainya. Pada Renja Dinas Sosial tahun 2023 tidak terdapat usulan program/ kegiatan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana diperlukan peran masyarakat yang seluas luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Sebab permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Sehingga masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan merupakan sesuatu yang hendak dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari misi maka tujuan harus dapat mewujudkan suatu kondisi yang dicapai dimasa mendatang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur. Tujuan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial.

Selanjutnya, sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan pejabaran konkrit dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran rencana kerja Dinas Sosial sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Sidenreng Raappang

Dinas Sosial

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Urusan/Bidang | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|---|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| NON URUSAN | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 3,513,522,993 | APBD | | 100 Persen | 3,548,658,223 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 49,568,083 | APBD | | 100 Persen | 50,063,764 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun | Kab. Sidenreng Rappang | 6 Laporan | 49,568,083 | APBD | | 6 Laporan | 50,063,764 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 2,255,835,000 | APBD | | 100 Persen | 2,278,393,350 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Sidenreng Rappang | 12 Bulan | 2,222,000,000 | APBD | | 12 Bulan | 2,244,220,000 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Administrasi Keuangan | Kab. Sidenreng Rappang | 12 Bulan | 5,050,000 | APBD | | 12 Bulan | 5,100,500 |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kab. Sidenreng Rappang | 12 Bulan | 16,160,000 | APBD | | 12 Bulan | 16,321,600 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun | Kab. Sidenreng Rappang | 1 Laporan | 2,525,000 | APBD | | 1 Laporan | 2,550,250 |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kab. Sidenreng Rappang | 1 Dokumen | 5,050,000 | APBD | | 1 Dokumen | 5,100,500 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|--|-------------------|--------------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang Disusun | Kab. Sidenreng Rappang | 12 Laporan | 5,050,000 | APBD | | 12 Laporan | 5,100,500 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 17,170,000 | APBD | | 100 Persen | 17,341,700 |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disusun | Kab. Sidenreng Rappang | 1 Laporan | 3,535,000 | APBD | | 1 Laporan | 3,570,350 |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | Kab. Sidenreng Rappang | 1 Laporan | 3,535,000 | APBD | | 1 Laporan | 3,570,350 |
| Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | 13 Unit | 10,100,000 | APBD | | 13 Unit | 10,201,000 |
| Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 9,700,910 | APBD | | 100 Persen | 9,797,919 |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawian | Kab. Sidenreng Rappang | 2 Dokumen | 5,307,410 | APBD | | 2 Dokumen | 5,360,484 |
| Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Sidenreng Rappang | 2 Laporan | 4,393,500 | APBD | | 2 Laporan | 4,437,435 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 373,350,000 | APBD | | 100 Persen | 377,083,500 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Sidenreng Rappang | 12 Bulan | 15,150,000 | APBD | | 12 Bulan | 15,301,500 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia | Kab. Sidenreng Rappang | 0 Unit | 35,000,000 | APBD | | 0 Unit | 35,350,000 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Sidenreng Rappang | 12 Bulan | 12,120,000 | APBD | | 12 Bulan | 12,241,200 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Luar Maupun dalam Daerah yang Dilaksanakan | Kab. Sidenreng Rappang | 210 Kali | 311,080,000 | APBD | | 210 Kali | 314,190,800 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 207,555,000 | APBD | | 100 Persen | 209,630,550 |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|--|-------------------|----------------------|
| Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang Diadakan | Kab. Sidenreng Rappang | 50 Unit | 71,205,000 | APBD | | 50 Unit | 71,917,050 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin yang Diadakan | Kab. Sidenreng Rappang | 50 Unit | 136,350,000 | APBD | | 50 Unit | 137,713,500 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 210,080,000 | APBD | | 100 Persen | 212,180,800 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Sidenreng Rappang | 1500 Lembar | 2,020,000 | APBD | | 1500 Lembar | 2,040,200 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Sidenreng Rappang | 12 Bulan | 36,360,000 | APBD | | 12 Bulan | 36,723,600 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kab. Sidenreng Rappang | 12 Bulan | 171,700,000 | APBD | | 12 Bulan | 173,417,000 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 390,264,000 | APBD | | 100 Persen | 394,166,640 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara | Kab. Sidenreng Rappang | 13 Unit | 153,924,000 | APBD | | 13 Unit | 155,463,240 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara | Kab. Sidenreng Rappang | 13 Unit | 13,130,000 | APBD | | 13 Unit | 13,261,300 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara | Kab. Sidenreng Rappang | 1 Unit | 202,000,000 | APBD | | 1 Unit | 204,020,000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara | Kab. Sidenreng Rappang | 0 Unit | 21,210,000 | APBD | | 0 Unit | 21,422,100 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Cakupan Lembaga Kesejahteraan Yang Dibina | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 1,003,183,510 | APBD | | 100 Persen | 1,013,215,345 |
| Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase PSKS Yang Tertangani | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 1,003,183,510 | APBD | | 100 Persen | 1,013,215,345 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|--|-------------------|--------------------|
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah TKSK yang Berpotensi Mendapatkan Penguatan Berinovasi dan Terus Beradaptasi | Kab. Sidenreng Rappang | 11 Orang | 30,300,000 | APBD | | 11 Orang | 30,603,000 |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga Yang Menerima Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu | Kab. Sidenreng Rappang | 10614 KK | 94,183,510 | APBD | | 10614 KK | 95,125,345 |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga yang Dibina | Kab. Sidenreng Rappang | 6 Lembaga | 878,700,000 | APBD | | 6 Lembaga | 887,487,000 |
| PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Warga Negara Migran Yang Tertangani | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 1,515,000 | APBD | | 100 Persen | 1,530,150 |
| Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal | Persentase Warga Negara Migran yang Dipulangkan | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 1,515,000 | APBD | | 100 Persen | 1,530,150 |
| Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran yang Difasilitasi untuk Dipulangkan | Kab. Sidenreng Rappang | 1 Orang | 1,515,000 | APBD | | 1 Orang | 1,530,150 |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Dibina | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 383,640,000 | APBD | | 100 Persen | 387,476,400 |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 383,640,000 | APBD | | 100 Persen | 387,476,400 |
| Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti | Kab. Sidenreng Rappang | 15 Orang | 140,640,000 | APBD | | 15 Orang | 142,046,400 |
| Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat | Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti | Kab. Sidenreng Rappang | 590 Orang | 81,000,000 | APBD | | 590 Orang | 81,810,000 |
| | Jumlah Anak Telantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti | Kab. Sidenreng Rappang | 31 Orang | 81,000,000 | APBD | | 31 Orang | 81,810,000 |
| | Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti | Kab. Sidenreng Rappang | 1549 Orang | 81,000,000 | APBD | | 1549 Orang | 81,810,000 |
| Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Warga Negara yang Diberi Layanan Kedaruratan | Kab. Sidenreng Rappang | 0 Orang | 0 | APBD | | 0 Orang | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|--|-------------------|--------------------|
| Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial yang Direhabilitasi | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 0 | APBD | | 100 Persen | 0 |
| Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Yang Bekerja Sama Memberi Edukasi Tentang Bahaya Dampak Narkoba | Kab. Sidenreng Rappang | 0 Lembaga | 0 | APBD | | 0 Lembaga | 0 |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Cakupan Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 156,401,070 | APBD | | 100 Persen | 157,965,081 |
| Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Persentase Anak Terlantar yang Tertangani | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 7,070,000 | APBD | | 100 Persen | 7,140,700 |
| Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | Jumlah Anak Terlantar yang Tertangani | Kab. Sidenreng Rappang | 10 Orang | 7,070,000 | APBD | | 10 Orang | 7,140,700 |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 149,331,070 | APBD | | 100 Persen | 150,824,381 |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Masyarakat Miskin yang Dikelola | Kab. Sidenreng Rappang | 12951 KK | 140,000,000 | APBD | | 12951 KK | 141,400,000 |
| Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mendapat Fasilitasi Bantuan Sosial | Kab. Sidenreng Rappang | 12951 KK | 9,331,070 | APBD | | 12951 KK | 9,424,381 |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 200,000,000 | APBD | | 100 Persen | 202,000,000 |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 30,000,000 | APBD | | 100 Persen | 30,300,000 |
| Penyediaan Makanan | Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang Mendapatkan Paket Makanan | Kab. Sidenreng Rappang | 0 KK | 30,000,000 | APBD | | 0 KK | 30,300,000 |
| Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 170,000,000 | APBD | | 100 Persen | 171,700,000 |
| Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | Kab. Sidenreng Rappang | 37 Orang | 170,000,000 | APBD | | 37 Orang | 171,700,000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|--|-------------------|----------------------|
| PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 80,295,000 | APBD | | 100 Persen | 81,097,950 |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan | Kab. Sidenreng Rappang | 100 Persen | 80,295,000 | APBD | | 100 Persen | 81,097,950 |
| Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Taman Makam Pahlawan, Monumen dll Yang Telah Direhabilitasi | Kab. Sidenreng Rappang | 3 Unit | 80,295,000 | APBD | | 3 Unit | 81,097,950 |
| | | | | 5,338,557,573 | | | | 5,391,943,149 |

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 perlu penjabaran program dan kegiatan sebagai berikut:

Dinas Sosial

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja |
|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 4 |
| NON URUSAN | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Administrasi Keuangan |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun |
| | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang Disusun |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disusun |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun |
| | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Luar Maupun dalam Daerah yang Dilaksanakan |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang Diadakan |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin yang Diadakan |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara |

| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Cakupan Lembaga Kesejahteraan Yang Dibina |
| | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase PSKS Yang Tertangani |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah TKSK yang Berpotensi Mendapatkan Penguatan Berinovasi dan Terus Beradaptasi |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga Yang Menerima Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga yang Dibina |
| 3 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Warga Negara Migran Yang Tertangani |
| | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal | Persentase Warga Negara Migran yang Dipulangkan |
| | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran yang Difasilitasi untuk Dipulangkan |
| 4 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Dibina |
| | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang memperoleh rehabilitasi |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti |
| | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat | Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti |
| | | Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti |
| | | Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti |
| | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Warga Negara yang Diberi Layanan Kedaruratan |
| | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial yang Direhabilitasi |
| | Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Yang Bekerja Sama Memberi Edukasi Tentang Bahaya Dampak Narkoba |
| 5 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Cakupan Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin |
| | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Persentase Anak Terlantar yang Tertangani |
| | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | Jumlah Anak Terlantar yang Tertangani |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Masyarakat Miskin yang Dikelola |
| | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mendapat Fasilitasi Bantuan Sosial |
| 6 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial |
| | Penyediaan Makanan | Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang Mendapatkan Paket Makanan |
| | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap |
| | Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah TAGANA yang Diberdayakan |
| 7 | PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Taman Makam Pahlawan, Monumen dll Yang Telah Direhabilitasi |

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan yang meliputi program dan kegiatan yang didalamnya menggambarkan capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran. Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional di bidang sosial. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 tersebut, yang dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2023, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan didalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih sering belum sepahaman.
4. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5. Rencana Kerja SKPD, didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra Dinas
6. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang Sosial.

Pangkajene Sidenreng, Maret 2022
Kepala Dinas Sosial,

Soalihin, S. Pd., M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP.19660717 199103 1 018